

## Perspektif Pluralisme Politik Menurut Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan

Desi Sapitri Harahap<sup>1</sup>, Zulkarnaen<sup>2</sup>, Sholahuddin Ashani<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; desisahpitriharahap@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; zulkarnaen@uinsu.ac.id

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; sholahuddinashani@uinsu.ac.id

Received: 03/06/2023

Revised: 22/06/2023

Accepted: 29/06/2023

### Abstract

This research discusses the Political Pluralism of the Representative Council Management Nahdlatul Ulama Branch (MWC NU) Tanjung Harapan Village, District Rank. Political Pluralism is respecting the various political views that exist in society and implementing diversity in the views of political parties, and political thoughts that are permitted to carry out differences peacefully and participate in politics without conflict. This research uses research methods through a qualitative descriptive approach. This research was also assisted by data collection techniques, namely through interviews, observation and documentation. This data collection technique makes it easier for researchers and involves directly with the relevant informants. The technique used to analyze the data obtained is to use descriptive methods.

### Keywords

Political Pluralism; MWC NU

### Corresponding Author

Desi Sapitri Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; desisahpitriharahap@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Kata "pluralisme" berasal dari bahasa Inggris, "*pluralism*". Apabila merujuk dari bahasa Inggris, definisi *Pluralism* adalah: "*In the social sciences pluralism is a framework in which groups show sufficient respect and tolerance of each other, that they fruitfully coexist and interact without conflict or assimilation.*" Suatu ruang lingkup di mana tempat setiap kelompok menampilkan rasa hormat dan toleransi satu sama lain, berinteraksi tanpa konflik atau asimilasi (pembauran/pembiasaan). Dalam kamus teologi, Pluralisme adalah pandangan filosofis yang tidak menganggap segala sesuatu pada satu prinsip terakhir, melainkan menerima adanya keragaman. Pluralisme dapat menyangkut bidang kultural, politik dan religius (Anam, 2014).

Pluralisme terangkat dari realitas pluralitas yang ada di tengah masyarakat, baik itu dalam hal agama, dan politik. Dari kalangan NU, Abdurrahman wahid dan Nurcholis Madjid adalah para tokoh utama penyebar paham pluralisme. Bahkan Gusdur di juluki bapak pluralisme, sedangkan Nurcholis Madjid dikenal salah satu tokoh pemikir Islam Indonesia dalam bidang Islam dan demokrasi. Dari pemikiran kedua tokoh ini melatar belakangi lahirnya Wahid Institute dan jaringan Islam liberal sebagai wadah bagi angkatan muda NU mengkaji masalah kontemporer dalam Islam di Indonesia (Azca et al., 2021).



Bangsa Indonesia sebagai negara yang tumbuh dan memiliki masyarakat yang campuran tentu sulit untuk mengembangkan rasa saling memahami antara berbagai keragaman. Sehingga perbedaan inilah yang menjadikan Indonesia memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika, dengan adanya semboyan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada setiap individu bahwa harus dapat menerima individu yang memiliki perbedaan dengan kita, harus saling menghormati satu dengan yang lainnya (Fachruddin, 2006).

Realitas Indonesia sebagai bangsa yang plural merupakan sebuah fitrah yang harus disyukuri. Realitas itu sudah menjadi ketetapan Allah (*sunnatullah*). pluralitas ini mewujudkan dalam bentuk budaya, bangsa, suku, agama, serta lainnya. Kesadaran manusia akan realitas dunia yang plural ini terus berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran manusia itu sendiri. Realitas dunia yang plural ini perjalanan selanjutnya kemudian berkembang menjadi sebuah pluralisme sebuah paham yang mengakui adanya kemajemukan (Bahruddin, 2017).

Pluralisme Politik adalah menghargai terhadap pandangan politik yang ada dalam masyarakat. Dan menerapkan keberagaman dalam pandangan partai politik, dan pemikiran politik yang diperbolehkan untuk melakukan perbedaan secara damai dan berpartisipasi dalam melakukan politik tanpa adanya konflik. Dan Pluralisme Politik di Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang melibatkan berbagai partai politik dengan ideologi yang beragam. Pluralisme politik memungkinkan adanya ruang untuk ekspresi politik dan partisipasi dari berbagai kelompok dan berbeda (Ghozali, 2021).

Pluralisme politik juga sebagai ruang demokrasi yang mampu membuka sumbatan-sumbatan agar kekuasaan dari berbagai kelompok rakyat dapat mengalir dengan bebas menuju penguasaan rakyat terhadap negara. Demokrasi telah menjamin bahwa pluralisme politik dalam sebuah negara tidak akan melahirkan negara totaliter, tidak akan menciptakan sentra kekuasaan pada golongan tertentu (seperti pada masa orde lama dan orde baru Indonesia). Pluralisme juga di gunakan dalam pengertian sosio-politik sebagai sistem yang mengakui koeksistensi keragaman kelompok baik yang bercorak ras, suku, aliran, kebudayaan, partai yang tetap menjunjung tinggi perbedaan yang sangat untuk dalam kelompok tersebut (Hamdi et al., 2019).

Makna sosial politik pluralisme tersebut menunjukkan bahwa pluralisme tidak saja mengisyaratkan adanya kesediaan untuk mengakui hak kelompok lain, tetapi juga harus bersedia berlaku adil kepada kelompok lain atas dasar perdamaian dan saling menghormati. Maka dalam hal ini penting dikedepankan tentang pluralisme yang menekankan bahwa kelompok-kelompok minoritas dapat serta secara penuh dan setara dengan kelompok mayoritas dalam masyarakat dengan tetap mempertahankan identitas mereka, dengan maksud mencari persamaan sebanyak mungkin dan meminimalkan perbedaan di antara kelompok.

## **2. METODE**

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian jenis kualitatif merupakan penelitian yang tidak memperoleh temuan-temuan dengan cara statistik. Penelitian kualitatif mengumpulkan sebanyak-banyaknya data melalui hasil pengamatan, lalu data tersebut diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. *Charters* menyatakan bahwa penelitian kualitatif terdiri atas hal nya pemulihan sebuah masalah dari sumber mana saja, lalu secara hati-hati memecahkan masalah tersebut tanpa memikirkan kehendak sosial, ekonomi atau masyarakat. Penelitian kualitatif artinya data yang dikumpulkan penulis berasal dari wawancara, catatan lapangan, observasi dan dokumentasi. Sehingga tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan

suatu fenomena yang mendalam secara rinci dan tuntas (Darmawan, 2021).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pemahaman Politik Menurut MWC NU**

Pemahaman politik menurut MWC NU bahwa politik yang ada di Indonesia adalah proses pembentukan dalam masyarakat yang berwujud perbuatan, keputusan khususnya dalam negara, upaya penggabungan definisi untuk yang berbeda mengenai hakikat politik yang disebut ilmu politik dan politik juga merupakan kedaulatan masyarakat yang termanifestasi dalam pemilihan parlemen dan presiden setiap lima tahun dan negara Indonesia yang berlangsung dalam rangka republik demokrasi perwakilan presidensial di mana presiden yang dikuasai adalah negara (Nurwahyudi, 2021).

Maka betapa pentingnya untuk orang-orang Islam itu berpolitik, menurut pemahaman MWC NU, berpolitik bagi umat Islam itu wajib hukumnya. Supaya mengingat ada banyak pelajaran sejarah, negara-negara yang dulu mayoritas muslim, kemudian berjalannya waktu menjadi negara yang minoritas muslim, itu disebabkan oleh umat Islam yang ada di kalangan politik sibuk mengurus tujuan politik partai masing-masing, lupa dengan tujuan utama, bahwa berpolitik bagi seorang muslim, untuk menjaga umat dan syariat Islam. Penyebab lain adalah umat Islam buta politik, umat Islam tidak peduli dengan politik, umat Islam tidak mau terlibat dalam politik, umat Islam menganggap politik itu kotor, jadinya umat Islam berusaha menghindari politik praktis. Oleh karena itu tidak berlebihan jika kita katakan wajib ada sebagian muslim yang terlibat dalam politik untuk menjadikan umat Islam lebih menguasai politik (Anam, 2014).

Umat Islam juga harus terlibat dalam politik agar Indonesia ini tidak di politik oleh orang-orang yang salah dengan politiknya. Penting untuk terlibat dalam politik, namun tujuan utama seorang muslim berpolitik adalah untuk menjaga umat dan syariat Islam dan umat Islam harus ikut dalam berpolitik karena ajaran *Amar makruf nahi munkar*. Maka umat Islam harus belajar berpolitik mesti ikut dalam partai politik tersebut atau bisa juga memahami tentang politik jangan sampai kita negara Indonesia atau agama Islam khususnya, bisa di politik dengan hal-hal yang aneh-aneh. Maka kita harus terlibat dengan partai politik, karena partai bukan tujuan tapi kendaraan untuk bisa ke tujuan yang sebenarnya yaitu untuk menjaga umat dan syariat Islam (Slamet, 2014).

Kalau dikatakan umat Islam berarti umum, dan kembali kepada pilihan masyarakatnya apakah mau ikut terlibat atau tidak kalau dibidang harus tidak harus tapi umat Islam wajib di antara umat Islam itu ikut dalam berpolitik dengan mengutamakan syariat wajib dan sunah rasul dan ketentuan perintah Allah SWT, wajib kalau menurut saya salah satu atau beberapa orang Islam itu harus ikut jadi harus dan wajib (Ulzikri et al., 2021).

#### **Pemahaman Pluralisme Politik MWC NU**

Pemahaman pluralisme politik menurut MWC NU (majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama) Pluralisme politik adalah menghargai adanya perbedaan di antara partai politik tidak ada konflik di antara sesama partai politik dan saling menghargai dalam beragama untuk berpolitik itu wajib, pandangan saya itu wajib kita harus saling menghargai baik itu sesama muslim maupun non muslim kita harus saling menghargai untuk bisa memberikan dampak yang positif kepada lingkungan, yang masyarakat tanpa membedakan ras, suku, budaya, politik maupun agama. Dan bagaimana pun kondisinya baik politik maupun yang lain kita tetap saling menghargai dengan yang lain sekalipun itu dengan non muslim dalam bertoleransi atau pluralisme saling menghargai dalam agama dan politik sejak dahulu memang sudah disarankan namun itu semuanya tergantung kepada kebijakan-kebijakan

kita sebagai umat beragama memang harus saling mengasihi dan saling menyayangi antara satu dengan yang lain sehingga mampu berpolitik dengan baik dan negara ini bisa semangkin maju dan berkembang (Munfaridah, 2017).

Pluralisme politik bisa dilihat dari aspek negara yang memberikan ruang bagi rakyat untuk menyebarkan kekuasaannya atas negara, penyebaran tersebut akan berakhir kepada dua titik yakni melalui partai politik dan non partai politik. Kita sebagai umat Islam boleh berpartai politik dan sah-sah saja dengan berbeda-beda partai atau dengan beda agama namun dalam ajaran agama Islam kita dianjurkan untuk berpolitik dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang uda kita tentukan dan kita bisa belajar dengan teman-teman kita (Nasor, 2018).

Maka partai apa saja yang mau kita pilih itu adalah pilihan kita sendiri dan karena partai bukan tujuan tapi kendaraan untuk bisa ke tujuan yang sebenarnya yaitu menjaga umat dan syariat Islam dan kebebasan umat Islam untuk memilih partai yang berbeda-beda ada partai yang bernuansakan agama ada yang bernuansakan nasional kalau menurut saya untuk idealnya umat Islam ada yang memiliki partai yang berlandaskan Islam jadi sebaiknya umat Islam juga lebih mengutamakan dan memprioritaskan dukungan terhadap partai yang berlandaskan kepada syariat Islam. Walaupun kita sebagai umat Islam memilih partai yang berbeda-beda tetapi kita sebagai umat Islam juga harus saling menghargai dan bertoleransi kepada sesama partai baik dia partai agama maupun partai nasional kita harus saling menghargai pendapat sesama partai (Hermawan & Sidik, 2021).

### **Sikap Politik MWC NU Terhadap Kader-kader Partai Politik**

Sikap politik kami terhadap kader-kader partai politik adalah untuk dukungan partai politik atau calon presiden dan kami akan mencari calon-calon yang diusung oleh beberapa partai ketika calon itu sudah terpilih maka kami secara organisasi anggap dia baik, toleransi dan amanah maka kami tidak menutup kemungkinan kami akan mendukung calon presiden yang diusung (Rofi'i, 2015).

Dan untuk dukungan partai politik dan presiden itu sangatlah penting dengan catatan sebagai masukan kepada orang-orang yang berpartai politik agar negara ini bisa aman dan sesuai yang kita harapkan dan terjalin kesatuan republik yang utuh sehingga partai politik menjadi yang lebih baik ke depannya. Serta agar berhati-hati dalam memilih pemimpin untuk lima tahun ke depan dan sikap kami terhadap partai politik sangat la baik jika pemimpin juga melakukan toleransi dan menghargai sesama masyarakat ataupun sesama partai politik (Suharto, 2015).

Maka saya sebagai generasi digital yang lebih mengenal media, kita akan menghargai setiap pilihan Warga Negara namun jika dalam ruang lingkup keluarga kita, kita akan memberikan pemahaman yang kita ketahui dengan berdasarkan data dan yang terjadi saat ini sehingga keluarga kita mengerti tujuan dan manfaat partai yang dipilih atau calon yang di usung.

Dan Setiap manusia memiliki hak dan pilihannya masing-masing tentu kita juga menghargai bahwa setiap orang itu berhak memilih siapa pun menjadi calon partai yang akan diajukan untuk sebagai calon legislatif maka untuk itu setiap manusia memiliki hak masing-masing dalam memilih siapa pun yang dipilihnya (Subakir & Mustamir, 2020).

Dan sikap kami terhadap politik identitas itu menurut saya tidak ada karna semua orang itu memiliki identitas apa yang dinamakan dengan politik identitas apa karna dia beragama muslim itu dikatakan identitas di mengajak sesama muslimnya, apa karna dia beragama Kristen mengajak secara pilihan sesama Kristennya untuk memilihnya non muslim (Rachmat, 2012).

Menurut saya sendiri politik identitas itu tidak ada karna memang sejatinya manusia itu sudah memiliki identitas jadi ketika dia mau mencalonkan diri baik itu sebagai bupati dan presiden kalau dia

memang muslim maka dia akan katakan dia muslim bukan karna dia muslim dia mengajak sesama muslim, non muslim pun apabila maju dalam pemilihan dia akan mengajak sesama non muslimnya untuk mendukungnya jadi saya merasa itu kembali tidak politik identitas. Harapan MWC NU terhadap partai politik umat Islam ialah kami berharap memiliki pemimpin atau partai politik yang memiliki sifat yang baik, jujur, amanah dan adil dalam memimpin masyarakat atau negara dan mampu memimpin masyarakat atau negara dengan ajaran Islam.

#### 4. KESIMPULAN

Pemahaman politik MWC NU bahwa politik yang ada di Indonesia adalah proses pembentukan dalam masyarakat yang berwujud perbuatan, keputusan khususnya dalam negara upaya penggabungan definisi untuk yang berbeda mengenai hakikat politik yang disebut ilmu politik dan politik juga merupakan kedaulatan masyarakat yang termanifestasi dalam pemilihan parlemen dan presiden setiap lima tahun negara Indonesia yang berlangsung dalam rangka republik demokrasi perwakilan presidensial di mana presiden yang di kuasai adalah negara. Berpolitik itu tidak masalah namun dalam politik itu yang seharusnya ditegakkan adalah kejujuran untuk mewakili aspirasi masyarakat yang harus di harap kan dan di terapkan di dalam kepemimpinan orang-orang yang ada di atas baik DPR, DPRD maupun Bupati dan wakil bupati serta jajarannya di atas. Mengenai pluralisme politik pengurus MWC NU (majelis wakil cabang Nahdlatul ulama) desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan sebagai berikut. Pluralisme merupakan sikap pemahaman dan kesadaran terhadap kenyataan adanya kemajemukan, keberagaman sebagai sebuah keniscayaan sekaligus ikut secara aktif memberikan makna signifikansinya dalam konteks pembinaan.

#### REFERENSI

- Anam, H. (2014). Aswaja dan NKRI: Upaya Mempertahankan NKRI melalui Aswaja. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 211–228. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i2.568>
- Azca, M. N., Salim, H., Arrobi, M. Z., Asyhari, B., & Usman, A. (2021). *Dua Menyemai Damai: Peran dan Kontribusi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Perdamaian dan Demokrasi*. UGM PRESS.
- Bahrudin, M. (2017). Peran Ulama Nahdlatul Ulama dalam Menyiarkan Paham Keagamaan Moderat di Provinsi Lampung. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 17(1), 43. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v17i1.1770>
- Darmawan, D. (2021). *Dinamika Riset Kualitatif: Diskusi Praktis & Penerapan Contohnya*. PT Remaja Rosdakarya.
- Fachruddin, F. (2006). *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*. Pustaka Alvabet.
- Ghozali, R. M. (2021). *Aktivisme Berbasis Pluralisme dan Multikulturalisme*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Hamdi, A. Z., Shofwan, Moh., & Muhammad, A. (2019). *Peran Organisasi Islam Moderat dalam Menangkal Ekstremisme: Studi Kasus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah*. UINSA.
- Hermawan, S., & Sidik, S. (2021). Negara, Politik Identitas, dan Makar: Pandangan Organisasi Massa Islam Tentang Makar dan Upaya Pencegahannya Melalui PERPPU Ormas. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 6(1), 15–33. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v6i1.3993>
- Munfaridah, T. (2017). Islam Nusantara Sebagai Manifestasi Nahdlatul Ulama (NU) dalam Mewujudkan Perdamaian. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 4(1), 19. <https://doi.org/10.21580/wa.v4i1.1476>
- Nasor, M. (2018). Implementasi Nilai-Nilai Dakwah dalam Membina Masyarakat Pluralitas (Studi pada Kegiatan Dakwah Nahdlatul Ulama Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan). *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 12(2), 27–54. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v12i2.2108>

- Nurwahyudi, A. (2021). Strategi Dakwah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Menangkal Radikalisme di Kabupaten Bondowoso. *Indonesian Journal of Islamic Communication*, 3(2), 93–115. <https://doi.org/10.35719/ijic.v3i2.668>
- Rachmat, N. (2012). Sosio-Teologis: Memahami Dualitas Perspektif Pluralisme Agama di Indonesia. *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, 11(2), 43–53.
- Rofi'i, A. (2015). Politik Kebangsaan Nahdlatul Ulama Perspektif Pemikiran KH. Abdul Muchith Muzadi. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 4(02), 388–409. <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.388-409>
- Slamet, S. (2014). Nadhlatul Ulama dan Pluralisme: Studi pada Strategi Dakwah Pluralisme NU di Era Reformasi. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 8(1), 60–78. <https://doi.org/10.24090/komunika.v8i1.749>
- Subakir, A., & Mustamir, A. K. (2020). Gerakan Moderasi Islam Dalam Perspektif Deteksi Dini; Studi Gerakan Pemuda Ansor Kota Kediri. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Islam*, 31(2), 187–201.
- Suharto, T. (2015). Gagasan Pendidikan Muhammadiyah dan NU sebagai Potret Pendidikan Islam Moderat di Indonesia. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 9(1), 81. <https://doi.org/10.15642/islamica.2014.9.1.81-109>
- Ulzikri, A. R., Kurniawan, R. C., & Indrajat, H. (2021). Budaya Politik Warga Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung: Belajar dari Pencalonan Ma'ruf Amin dalam Pemilihan Umum 2019. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 1–16. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.108>